

Prehantono, Rizal, 2022. Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Pembimbing Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Abstrak

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Semarang yang merupakan suatu Kabupaten yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMER 9 TAHUN 2013. Kesadaran masyarakat akan dampak minuman beralkohol masih sangat rendah. Minuman beralkohol akan berdampak negatif bagi penggunanya. Pengguna dapat mengalami mabuk, seperti kehilangan kesadaran, berhalusinasi, mengakibatkan pusing, mual dan muntah-muntah, bahkan hal terburuknya apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan adalah mengakibatkan kematian bagi penggunanya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yaitu bentuk implementasinya berupa: (1) Pengawasan secara intem dan ekstern, (2) Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan beralkohol secara ilegal.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten, Peredaran Minuman Beralkohol.

Abstract

Social problems in the midst of society are always changing and will continue to develop following the dynamics of the community itself. The people of Semarang Regency are no exception, which is a religious, comfortable, orderly and calm regency. The problem of liquor/alcohol itself, is undeniably very disturbing the social life of the community. Liquor is believed to not only harm the wearer, but also has a bad impact on the community. The purpose of this study is to analyze and explain LAW ENFORCEMENT BASED ON REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY NUMBER 9 OF 2013. Public awareness of the impact of alcoholic beverages is still very low. Alcoholic beverages will have a negative impact on users. Users can experience drunkenness, such as losing consciousness, hallucinating, causing dizziness, nausea and vomiting, even the worst thing if consuming alcoholic beverages in excess is causing death for the user.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Because in this study the author provides an overview of laws and other regulations with implementation in the field. Sociological juridical is an approach that prioritizes legal/juridical rules combined with examining social facts related to research.

The results of this study indicate that the Effectiveness of Supervision and Control of the circulation of Alcoholic Drinks based on the Regional Regulation of Semarang Regency Number 9 of 2013 is in the form of implementation in the form of: (1) Internal and external supervision, (2) Guidance on places where alcoholic beverages are sold illegally, and (3) Control of places where alcohol is sold illegally.
Keywords: District Regulations, Circulation of Alcoholic Drinks.